



AWUT-AWUTAN SOAL ANGGARAN KEMISKINAN

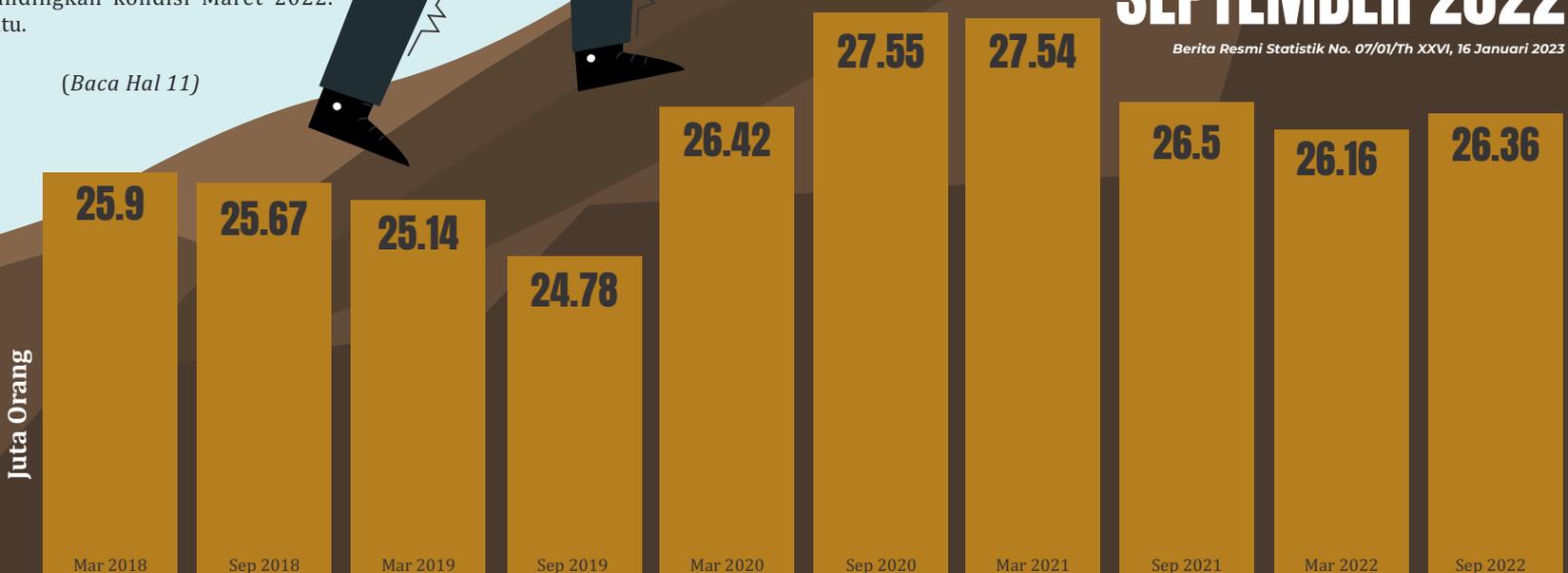
Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan, anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit. Informasi tersebut tentu menyentak publik, dinilai sebagai bukti awut-awutannya program pemerintah untuk rakyat kecil. Anas pun langsung meluruskan, Minggu (29/1/2023) dengan menegaskan bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, tapi sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal. Apapun bahasa, apapun istilahnya, yang pasti menurut data terbaru BPS, persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen (26,36 juta orang). Angka tersebut meningkat sebesar 0,03 persen poin atau sekitar 0,20 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2022. Begitu.

(Baca Hal 11)

Nusantara (Hal.5)
Reformasi Birokrasi
Targetkan Penurunan
Kemiskinan

JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA SEPTEMBER 2022

Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th XXVI, 16 Januari 2023



Isu Reshuffle Menguat Jelang Rabu Pon, Jokowi: Masa?

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomentar soal isu perombakan kabinet jelang 'hari keramat' Rabu Pon yang kerap dikaitkan dengan reshuffle. Apalagi sebelumnya, ada pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, pendiri partai NasDem yang belakangan dikabarkan bakal didepak dari kabinet.

"Hmm, masa? Rabu Pon? Benar? Ya, nanti tunggu saja," jawab Jokowi sembari tersenyum di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Sejak menjabat pada 2014 lalu, Jokowi memang selalu menjadikan hari Rabu Pon sebagai waktu untuk mengumumkan kebijakan reshuffle. Jokowi pertama kali melakukan reshuffle pada Rabu, 12 Agustus 2015. Ditelisik dalam kalender Jawa, tanggal tersebut jatuh pada Rabu Pon. Hal yang sama dilakukan Jokowi pada reshuffle kabinet berikutnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan perombakan kabinet merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi, selaku orang nomor satu di Indonesia. Soal tanggal 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon, Hasto meminta agar publik menunggu keputusan presiden. "Kalau reshuffle, kan, hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

PDIP sendiri, lanjut Hasto, telah memberikan masukan soal hal tersebut. Namun, ia enggan membeberkan nama yang disetorkan oleh partainya ke Jokowi. "Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ucapnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek membenarkan informasi



Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri menghadiri Kick-Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023). (Foto: Kemlu)

bahwa Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono sudah dipanggil Presiden Joko Widodo. Panggilan tersebut dilakukan di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan pada Rabu 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu Pon.

Meskipun Awiek mengaku tidak mengetahui persis apa yang menjadi pembahasan Mardiono dengan Jokowi. "Sudah beberapa kali memang dipanggil ke Istana, tetapi tidak tahu persis apa yang dibahas," ujar Awiek, Minggu (29/1/2023).

Awiek juga enggan membeberkan waktu pastinya Mardiono dipanggil ke Istana. Yang jelas, kata Awiek, PPP akan memberikan kader terbaik jika dipercayakan lagi untuk menjadi menteri kabinet. "Kalau PPP dipercaya, Insyallah siap," tandas Awiek.

Lebih lanjut, Awiek akan menghormati langkah Presiden Jokowi jika akhirnya mengumumkan

reshuffle kabinet pada Rabu mendatang. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

NasDem Ngaku Bahagia

Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara menuai tanda tanya soal isi pembicaraannya. Akhir pekan ini, Jokowi buka suara soal pertemuannya dengan Surya Paloh. Jokowi tak membuka seutuhnya isi pertemuan dirinya dengan Surya Paloh. Dia menilai tak ada yang istimewa dari pertemuannya dengan Surya Paloh. "Biasa-biasa saja," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu sempat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang mencuat. Namun, Jokowi enggan berbicara lebih lanjut. "Mau tahu aja," kata Jokowi.

Diketahui, ihwal pertemuan Jokowi dan Paloh banyak diungkap oleh para petinggi NasDem. Pertemuan itu juga direspons partai lain yaitu PDIP.

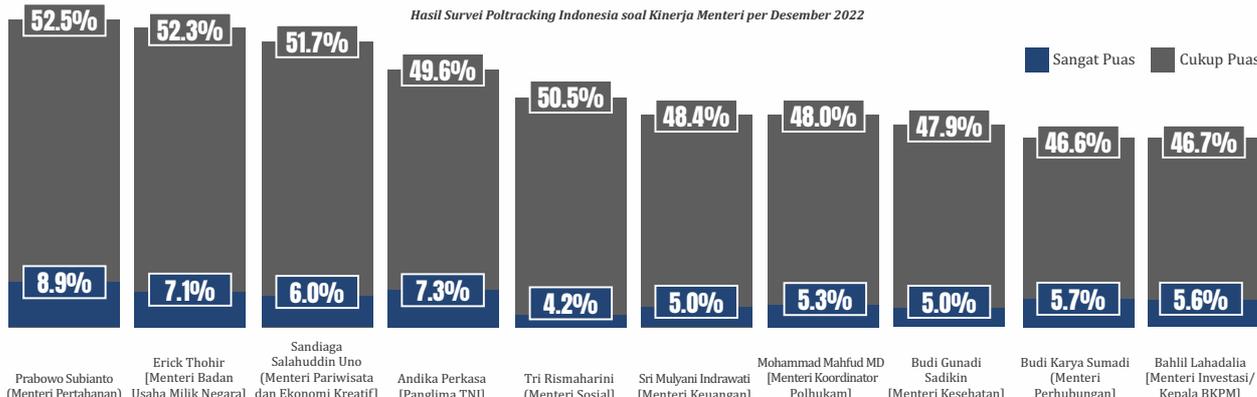
Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto membenarkan Surya Paloh bertemu dengan Jokowi, Kamis (26/1/2023), di Istana Negara. NasDem menyebut pertemuan keduanya seperti kakak beradik yang tidak komunikasi tiga bulan. "Jadi ekspresi yang nampak, kebetulan saya pertanyakan kepada Pak Surya, bagai kakak adik yang kurang lebih selama tiga bulan tidak berkomunikasi lantas berkomunikasi dengan sangat baik," kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Sugeng menduga pertemuan keduanya pasti berbicara tentang bangsa. Anggota DPR RI ini menyebut keduanya pasti bicara terkait tantangan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai persoalan lainnya. "Saya menduga bahwa ini adalah cara membangun kebersamaan, saya tahu persis karena saya sering mendampingi Pak Surya ketemu Pak Jokowi. Beliau-beliau ini kalau bertemu pasti berbicara tentang bangsa, berbagai tantangannya dan secara implisit karena, dan saya kan tidak mau mengorek-ngorek lebih jauh ya, ya seperti biasanya lah kita ketemu," jelasnya.

"Maka kami-kami itu bahagia betul rasanya, kenapa? Semua pihak saya kira sadar ya bahwa sekali lagi tokoh-tokoh besar ini tidak hanya Pak Surya, tidak hanya Pak Jokowi, tapi tokoh-tokoh yang lain alangkah eloknya gitu, alangkah bagusya kalau saling membahas persoalan bangsa secara bersama-sama. Duduk membahas berbagai persoalan," lanjut dia. (wid,rls,kum/dya)

10 MENTERI KABINET INDONESIA MAJU DENGAN TINGKAT KINERJA EVALUASI TERBAIK

Hasil Survei Poltracking Indonesia soal Kinerja Menteri per Desember 2022



'DPR Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi'

JAKARTA - DPR RI saat ini dinilai sebagai parlemen yang paling hening selama masa Reformasi. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa operasi pelemahan politik terhadap suara kritis, termasuk terhadap parlemen yang berperan sebagai pemberi check and balances bagi kekuasaan, telah berhasil.

"Bisa saya sampaikan bahwa DPR kita kali ini adalah DPR paling tenang dan paling hening sepanjang sejarah Reformasi, di mana DPR selalu mengiakn, seia sekata dengan pemerintah, padahal fungsinya seharusnya melakukan kritisme kepada pemerintah," jelas Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga

Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, Minggu (29/1/2023) dalam acara "Peluncuran Outlook 2023, Ritual Oligarki Menuju 2024".

Ia menyinggung soal berbagai upaya kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kritikan dari parlemen, seperti pelemahan KPK, pembuatan Omnibus Law yang berujung vonis inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi, serta penyusunan KUHP baru yang kontroversial. "Lima tahun ini kita merasa tidak punya wakil rakyat," ucap Wijayanto.

Diungkapkannya bila operasi

pelemahan politik dan kekuatan oposisi ini dilakukan secara terus-menerus bahkan dalam mengintervensi struktur partai politik. Wijayanto menceritakan ulang bagaimana pada 2021 terjadi upaya eksternal merebut Partai Demokrat. Berikutnya, sukses kepemimpinan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga yang terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dianggap tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi kekuasaan.

"Sehingga tokoh baru yang terpilih adalah yang lebih dekat atau lebih tunduk kepada kekuasaan," ungkap Wijayanto. Saat itu hanya Demokrat yang terbilang cukup tangguh untuk melawan intervensi semacam itu dan berhasil bertahan sebagai kekuatan oposisi. "Tahun 2022 memang tidak ada peristiwa seperti itu (Demokrat), tapi itu justru merefleksikan bahwa kenyataan semua oposisi dan lawan politik sudah bagian dari kekuasaan, makanya tidak ada seperti itu lagi," ujar Wijayanto.

Hasil pengamatan Wijayanto, bukan hanya pelemahan DPR sebagai mitra kritis penguasa, tetaoi terdapat tiga indikator lain yang juga menunjukkan upaya pelemahan politik dilakukan selama lima tahun terakhir, yaitu diabaikannya aturan main demokratis, meningkatnya anjuran kekerasan, dan pemberangusan kebebasan sipil. Wijayanto menyatakan, hal ini merupakan petunjuk bahwa kepentingan oligarki masih mengakar kuat di kekuasaan, bahkan semakin kuat dibandingkan 2019 dan sedang mengonsolidasikan dirinya menghadapi Pemilu 2024.

"Jadi, dari berbagai indikator itu, kami melihat adanya tanda-tanda yang klir tentang kemunduran demokrasi yang masih berlanjut," ucap Wijayanto.

Sebelumnya hasil serupa diungkapkan jajak pendapat Litbang Kompas. Survei itu menunjukkan DPR masih dianggap belum kritis dalam menjalankan tugasnya. Survei yang berlangsung 10-12 Januari 2023 itu menyodorkan tiga pertanyaan terkait sikap kritis DPR yakni saat membahas rancangan undang-undang, anggaran pemerintah, dan melakukan fungsi pengawasan. Sebanyak 56,6 persen responden menilai para anggota Dewan belum kritis dalam membahas rancangan undang-undang.

Sedangkan 36,3 persen menyatakan anggota DPR sudah kritis. Kemudian 54,9 persen responden menilai anggota DPR tak kritis dalam membahas anggaran pemerintah. Hanya 33,8 persen yang menilai anggota Dewan sudah kritis. Lalu 57,3 persen responden



Suasan sidang di DPR RI yang hanya sedikit dihadiri langsung oleh anggotanya meski pandemi corona sudah melandai. (Foto-dok)

mengatakan anggota Parlemen belum kritis dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sedangkan 34,8 persen merasa anggota DPR sudah cukup kritis menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam jajak pendapat yang sama, mayoritas publik pun menyatakan tak puas dengan kinerja DPR setahun terakhir. Sebanyak 67,9 persen merasa tak puas, 28,6 persen merasa puas, dan 3,5 persen mengatakan tidak tahu. Diketahui survei melibatkan 512 responden dari 34 provinsi yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

Senggol Presidential Threshold

Terpisah, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang permasalahan demokrasi hari ini disebabkan sistem pemerintahan yang tidak koheren atau berkaitan secara efektif. Menurut Titi, konsensus atau kesepakatan yang muncul oleh para elite politik bukan untuk mengokohkan check and balances, melainkan berorientasi pada bagi-bagi kekuasaan.

"Saya kira, tadi sudah banyak diuraikan bahwa kegagalan kita dikonstruksikan oleh ketidakmampuan menghadirkan koherensi antarsistem. Jadi gimana sistem itu didesain terpisah dan secara sengaja untuk tidak terhubung secara efektif mulai dari sistem kepartaian, pemilu, sampai dengan sistem pemerintahan kita," katanya.

"Nah itu yang kemudian membuat kita kesulitan mendapat output yang sifatnya akuntabel dan efektif. Bukan kita tidak mampu mencapai konsensus tetapi konsensus yang kita wujudkan melalui kesepakatan para elite itu justru bukan untuk mengokohkan pemisahan kekuasaan ataupun mekanisme check and balances tetapi yang lebih mengedepankan bagi-bagi kekuasaan," imbuhnya.

Titi lalu menyinggung syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% yang menurutnya tak ada rujukan akademiknya di dunia. Dia menilai syarat presidential threshold ini belakangan justru tak menciptakan pemerintahan yang efektif atau kontrol di antara capres yang berkontestasi.(wid,rsl,ant/dya)

DAFTAR 39 RUU PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2023 YANG AKAN DIBAHAS DPR

USULAN DPR

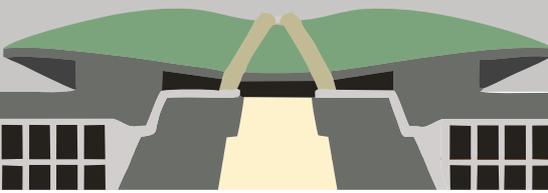
1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

USULAN PEMERINTAH

1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 11.
- Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

USULAN DPD

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
3. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang



Ratusan Massa Rusak Kantor AREMA FC

MALANG - Aksi demonstrasi oleh massa yang mengatasnamakan sebagai Arek Malang di depan Kandang Singa atau Kantor Arema FC Malang berakhir ricuh, Minggu (26/1/2023). Akibatnya, setidaknya ada enam orang terluka serta kerusakan parah terjadi pada Kantor di Jalan Mayjend Panjaitan 42 Kota Malang.

Para korban luka tersebut antara lain dua orang satpam kantor Arema FC, tiga dari security tim Arema FC dan manajer Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas. Bahkan tiga dari security tim harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang karena mengalami pendarahan.

Diansir dari merdeka.com peristiwa itu bermula ketika massa mendatangi Kantor Arema FC sekitar pukul 11.30 WIB. Massa dengan dresscode hitam awalnya berkumpul di Taman Makam Pahlawan, Jalan Veteran Kota Malang. Mereka long march dengan membentangkan aneka spanduk dan poster menuju kantor Arema FC, yang berjarak sekitar 1 Km. Ratusan massa tersebut berjalan memenuhi jalan sambil menyanyi-nyanyi dan beberapa di antaranya menjalankan flare.

Massa langsung memasuki pelataran Kantor Arema FC dan beberapa sempat berorasi menyampaikan tuntutan. Namun tidak berselang lama beberapa orang terlibat aksi perang mulut, saling pukul dan dorong di barisan depan. Menyusul terjadi lemparan bertubi-tubi ke arah toko merchandise tersebut. Dari arah massa aksi melemparkan kayu dan bebatuan hingga terjadi beberapa kali.

Beberapa massa Aremania terlibat aksi bentrok dengan sesama Aremania dan petugas keamanan penjaga kantor Arema FC. Massa juga sempat membakar beberapa material dari sekitar lokasi ke tengah Jalan Mayjen Panjaitan depan Kantor Arema FC.

Akibat kejadian tersebut beberapa bagian Kantor Arema FC rusak, termasuk di antaranya kaca pos satpam. Sementara hampir keseluruhan kaca toko Arema FC rusak. Barang-barang di dalamnya tampak berserakan, kendati masih berada di tempatnya.

Farid, Satpam kantor Arema FC yang menjadi korban pelemparan batu mengatakan, bahwa kejadian keriuhan tersebut berlangsung cepat. "Mereka (massa aksi) datang langsung ricuh. Kemudian ada lemparan ke store. Kacanya pecah dan saya kena lemparan batu juga," ucapnya, dilansir dari Surya.

Farid mengatakan sebenarnya sebenarnya dia sudah mengetahui, bahwa di Minggu ini akan ada unjuk rasa di kantor Arema FC. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa terjadi perusakan store Arema FC.

"Tadi itu cepat sekali. Batu melayang seperti hujan. Saat itu saya bantu melera kerichuan. Tiba-tiba kepala saya ini kena hantaman keras seperti dapat lemparan batu," terangnya.

Akibat lemparan batu tersebut, terdapat benjolan di kepala bagian kanan Farid. Dia tadi sempat mendapatkan perawatan oleh petugas medis dari Polresta Malang Kota. Selain Farid, Sando yang juga satpam juga mengalami memar di bahu sebelah kanan.

Sando terkena lemparan batu saat hendak melera kerichuan dalam unjuk rasa tersebut. "Cuma ini (sembari menunjukkan lengan sebelah kanan) yang luka. Selebih gak papa," ujar Sando.

Sementara itu, manajemen Arema FC menyatakan kejadian ini insiden ini menyebut bahwa mereka sebetulnya selalu terbuka untuk berdialog dengan siapa pun. "Manajemen selalu terbuka untuk berdialog. Kantor selalu membuka diri, bahkan kami juga menerima keluhan kesah Aremania. Beberapa waktu lalu Arema FC juga membuka crisis center," kata Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi (PT AABBI), Tatang Dwi Arifianto, dilansir dari bola.net.

"Kami terbuka untuk berdialog,

bukan dengan cara perusakan rumah kami," sambungnya.

Tatang mengatakan Arema FC berusaha untuk menahan diri dari provokasi yang dilakukan. Hal ini persis seperti sikap mereka ketika bus yang ditumpangi skuad Arema FC diserang oleh oknum usai melakoni pertandingan tandang melawan PSS Sleman beberapa waktu lalu.

"Sebelumnya rombongan bus juga diserang oleh oknum tertentu," kata Tatang. "Kami berusaha menahan diri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," tambahnya.

A t a s insiden tersebut, manajemen Arema FC menyerahkan pengurusan perusakan kantor ke kepolisian. Mereka berharap agar kasus ini diurus tuntas sehingga tak menimbulkan fitnah. "Bagi oknum pelaku yang melakukan pengrusakan dan anarkisme agar tidak timbul fitnah untuk bisa diungkap," tutur Tatang. "Anarkisme dan perusakan bukan karakter Arema," ia menegaskan.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan saat ini sudah ada 107 orang yang diamankan oleh polisi. Polisi berdalih mengamankan untuk mengambil keterangan apakah tergabung dalam massa aksi atau

tidak. "Ada 107 yang diamankan diduga ada saat aksi. Saat ini semuanya masih dalam pendalaman Polresta Malang Kota," kata Perwira yang akrab disapa Buher ini. Dalam kerichuan di Kantor Arema FC.

Ada sejumlah kerusakan karena lemparan demonstran. Di antaranya kaca di Arema FC Store atau outlet resmi klub hingga pos keamanan Arema FC. Selain itu, ada beberapa orang yang terluka baik dari demonstran dan juga orang-orang yang menjaga kantor Arema FC.

"Jika tidak ada kaitan dan perbuatan melawan hukum. (107 orang yang ditahan) Akan kita pulangkan ke pihak keluarga. Kami akan melakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku aksi yang anarkis termasuk mendalami aktor intelektual dibalik aksi anarkis tersebut," ujar Buher.

Demonstran yang mengatasnamakan Arek Malang Bersikap ini kecewa dengan sikap manajemen Arema FC yang dianggap tidak memiliki empati. Sebab selain tidak memberikan bantuan hukum pada korban. Arema FC justru sibuk berkompetisi. "Kami Polresta menyangkan adanya penyerangan terhadap kantor Arema FC. Kami juga lakukan penangkapan upaya paksa terhadap pelaku tindakan kekerasan perusakan," tutur Buher. Kerichuan tidak berlangsung lama. Tetapi sejumlah kerusakan membuat porak poranda kantor Arema FC.

Demonstran meminta manajemen aktif memberikan bantuan hukum atas pengurusan kasus Tragedi Kanjuruhan. Jika tidak demonstran meminta Arema FC mundur dari kompetisi Liga 1. (lut/dya)



Diduga kecewa usut tuntas Tragedi Kanjuruhan, ratusan massa mengatasnamakan Arek Malang mendatangi kantor Arema FC alias kandang Singa di Jalan Mayjen Panjaitan, Kota Malang, Minggu (29/1/2023).



Kami Polresta menyangkan adanya penyerangan terhadap kantor Arema FC. Kami juga lakukan penangkapan upaya paksa terhadap pelaku tindakan kekerasan perusakan,"

KOMBES POL BUDI HERMANTO
Kapolresta Malang Kota

Reformasi Birokrasi Targetkan Penurunan Kemiskinan



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program birokrasi harus berdampak optimal. Salah satunya, terkait pengentasan kemiskinan," ujar Anas dalam siaran pers yang diterima di Jakarta dikutip dari tempo.co, Minggu (29/1/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per-September 2022, persentase tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,57 persen atau menurun sebanyak 0,14 persen dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 yang berada di angka 9,71 persen.

"Target kemiskinan pada 2024 adalah tujuh persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan, minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai tujuh persen pada 2024," tambah Anas.

Menurut dia, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.

"Dalam konteks Kementerian PAN-RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka, salah satu langkahnya adalah mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kami bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya, soal penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dia menjelaskan reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat

sasaran. Di samping itu, ada pula melalui penyediaan dukungan teknologi informasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project pada tiga provinsi dan sembilan kabupaten/kota," ujarnya.

Anas mengatakan anggaran terkait penurunan kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia berkisar Rp500 triliun diharapkan dapat menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

"Termasuk pula Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual," katanya.

Anas menilai kegiatan sosialisasi kebijakan ataupun perjalanan dinas di berbagai kementerian akan dipilah sehingga yang diutamakan merupakan kegiatan yang memang diperlukan.

Dia mencontohkan untuk sosialisasi kebijakan kementerian di Kementerian PAN-RB, saat ini hampir semua kegiatan itu dilakukan secara daring. Kementerian PAN-RB pun telah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal pada setiap hari dengan kontak petugas yang bisa dihubungi.

"Semuanya kita kemas daring untuk memudahkan seluruh daerah jadi tidak perlu ke Jakarta untuk berkonsultasi. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemerintah kabupaten dari Sumatera untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan," ujarnya.

Berikutnya mulai tahun 2023 menurut dia, penilaian indeks

reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PAN-RB tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, tetapi juga sejak awal tahun.

Contohnya, adalah persoalan stunting, sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan, dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemerintah yang dievaluasi sejak awal tahun 2023.

"Mulai Januari 2023 sudah kita asistensi, termasuk apakah setiap pemda sudah mengalokasikan program makanan untuk anak stunting. Itu kita cek bersama Mendagri Pak Tito Karnavian sehingga logical framework tertata. Jangan sampai programnya stunting, tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi, tanpa dibelikan gizi setiap hari," ucap Anas.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023, Selasa (17/1/2023) lalu, Presiden RI Joko Widodo kembali menegaskan program prioritas penanganan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Presiden mengingatkan lagi kepada pemerintah daerah untuk menekan angka stunting di daerahnya masing-masing dan memenuhi target 2024 rata-rata stunting nasional 14 persen pada. Dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen.

Menyambut arahan Presiden tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) melaksanakan kegiatan "Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia", pada Rabu (18/1/2022).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menerangkan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi dan kendala terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang ada di seluruh 514 daerah (416 kabupaten/98 kota) di 34 provinsi sampai tingkat kecamatan, desa, dan Kelurahan di Indonesia.

Menko PMK menyampaikan, upaya percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem terus pemerintah

lakukan. Akan tetapi, menurutnya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peranan utama dari pemerintah daerah.

"Kasusnya itu di daerah dan di desa-desa dan kelurahan. Pusat tidak punya kasus. Karena itu, koordinasi penanganan terpadu terfokus menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal itu harus ada di tingkat paling bawah yaitu pada tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menerangkan, penentu tercapainya target nasional adalah pemerintah daerah. Menurutnya, target nasional untuk menurunkan stunting 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen adalah agregat dari kinerja pemerintah daerah.

Dia mengatakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri PMK beserta dengan Kementerian dan lembaga lainnya tidak memiliki peran signifikan. Pemerintah pusat hanya menjadi koordinator dan membantu dalam hal teknis. Sementara, pemerintah daerah sampai tingkat paling bawah yang paling tahu dalam permasalahan dan intervensinya.

"Karena stunting ini urusan konkuern dibagi tanggung jawab wewenangnya antara pusat dan daerah. Saya sampaikan Kemendagri PMK sebagai koordinator melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, andilnya sebetulnya tidak seberapa dibanding peran dan andil dari daerah," jelasnya.

Menurut Menko PMK, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem beririsan. Menurutnya, berbagai penanganan stunting seperti pemberian intervensi gizi akan memberikan pengaruh besar dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Dan juga, penanganan kemiskinan ekstrem dengan intervensi ekonomi sosial dan lingkungan juga akan menanganai stunting. Karenanya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara simultan supaya bisa tertangani dengan baik. "Yang tidak kalah penting koordinasi dan intervensi di lapangan harus betul-betul tepat sasaran," tegas Menko PMK.

Kegiatan "Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota" dimulai (18/1) dari Provinsi Jawa Barat. Dalam 3 hari ke depan setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota akan memaparkan berbagai informasi, penanganan dan permasalahan stunting yang ada di daerahnya masing-masing kepada Menko PMK. Selanjutnya kegiatan rapat daring akan marathon berlanjut dengan pengalihan informasi dari seluruh pemda. (lut/dya)



Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program birokrasi harus berdampak optimal. Salah satunya, terkait pengentasan kemiskinan,"

ABDULLAH AZWAR ANAS
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB)

HEBOH

DIKTA WIGAKSONO

Diduga Alami Pelecehan





MEDIA sosial (medsos) kini tengah dihebohkan dengan peristiwa dugaan pelecehan yang dialami penyanyi Dikta Wicaksono.

Dikta diduga mengalami pelecehan saat ia manggung di Sarinah, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Di media sosial, tersebar video Dikta terlihat kesakitan usai manggung. Bahkan, Dikta sampai terlihat berjongkok menahan rasa sakit pada area bawah perutnya.

Sambil berjongkok, Dikta nampak memegang pinggir meja dan wajahnya pun terlihat menahan sakit.

Tak lama, Dikta memutuskan untuk berdiri kembali, sambil dibantu orang lain, agar bisa berjalan.

Saat itu, Dikta terlihat dikawal ketat demi menjamin keamanan sang penyanyi di tengah banyaknya penggemar.

Peristiwa tersebut diketahui dari rekaman video yang diunggah akun TikTok @fantaaaat, Sabtu (14/01/2023).

Pada keterangan video, disebutkan bahwa Dikta mengalami tindakan tak menyenangkan di mana alat vitalnya dipegang oleh seseorang.

Pradikta Wicaksono atau Dikta Wicaksono adalah seorang musisi dan aktor asal Indonesia. Dikta lahir di Jakarta pada 10 Januari 1986.

Di media sosial, Dikta dikenal sebagai pemilik kucing gemas bernama Jimbon.

Tingkah laku manja serta ukurannya yang di atas normal membuat Jimbon menjadi salah satu kucing paling dikenal di dunia maya.

Kucing campuran ras stray cat dan Persia ini sudah dipelihara Dikta selama bertahun-tahun.

Dikta merupakan musisi asal Indonesia yang mengawali kariernya di industri musik Indonesia.

Belakangan ini, Dikta mencuri perhatian karena kehadirannya dalam acara olahraga Tiba-Tiba Tenis yang diadakan oleh VINDES Sport.

Cuplikan ketika dirinya disorot oleh kamera mampu membuat penonton di venue, terutama kaum hawa, bersorak histeris.

Tak hanya penonton langsung, netizen pun ikut mesem-mesem melihat Dikta yang salah tingkah ketika kamera menyorotnya.

Dikta memulai kariernya dan

mulai dikenal oleh masyarakat sejak bergabung dengan Yovie & Nuno pada tahun 2007. Kalau kamu familier dan sering menonton FTV, tentunya gak asing, nih, dengan beberapa lagu dari Yovie & Nuno.

Sejak kecil, Dikta memang memiliki ketertarikan yang besar di bidang musik. Oleh karena itu, bergabung dengan Yovie & Nuno menjadi batu loncatan baginya untuk bisa eksis di industri musik.

Namun, pada 1 Juni 2022, Dikta menyatakan bahwa dirinya resmi mengundurkan diri dari Yovie & Nuno setelah 15 tahun bersama.

Hadir di Tiba-Tiba Tenis dan menonton pertandingan tenis pastinya membuat Dikta senang. Pasalnya, dirinya juga merupakan penggemar tenis, bahkan jago dalam bermain tenis.

Beberapa unggahan dalam akun Instagramnya kerap menunjukkan intensitas Dikta dalam bermain tenis yang cukup sering.

Beberapa pose Dikta saat bermain tenis juga menunjukkan bahwa dirinya sudah cukup advance dalam olahraga tersebut.

Tidak hanya merambah ke industri musik, nyatanya Dikta juga pernah membintangi beberapa film dan serial.

Sebut saja seperti Drama Musikal Stereo di NET TV dan film romansa, yakni Gending Cinta di Tanah Turki, Dealova 2, hingga Love of Fate.

Nama Dikta belakangan ini luput dari perbincangan seputar kisah percintaannya. Diketahui berstatus jomblo hingga saat ini, ada beberapa perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan

dirinya, sebut saja seperti Prilly Latuconsina, Lania Fira, dan Enzy Stora.

Juri Indonesian idol

Dikta baru-baru ini didapuk sebagai juri Indonesian idol musim ke-12. Bahkan, ajang pencarian bakat ini diketahui sukses mencetak puluhan penyanyi profesional sejak pertama kali tayang pada 2004 silam.

Proses audisi Indonesian Idol musim ke-12 sendiri telah dimulai sejak September 2022 dan yang tayang setiap Senin dan Rabu pukul 19.00 WIB.

Tentunya kemunculan Dikta sebagai juri ajang pencarian bakat tersebut sukses membuat hembuh warganet

Setelah hengkang dari Yovie & Nuno, Dikta akhirnya mantap untuk membuka lembaran baru sebagai seorang penyanyi solo dengan merilis album EP Sendiri pada 14 Oktober 2022 lalu. Tentunya ini

langsung di-sambut baik oleh para penggemarnya, lho.

Album EP Sendiri, sebagai sebuah perkenalan ulang, secara garis besar menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana ia dibentuk lewat serangkaian proses yang panjang. Ia dilahirkan, tumbuh, dan dikelilingi oleh lingkungan musik yang berkontribusi pada sosoknya kini.

Baru-baru ini, Dikta bahkan menjadi salah satu penyanyi yang akan tampil dalam konser Iwan Fals yang bertajuk Petisi Cinta: Manusia Setengah Dewa di Ciputra Artpreuner pada 25 Februari 2023. Selain itu, ia juga kerap menggelar showcase untuk menyapa para penggemarnya (Berbagai sumber)



HIPERSOMNIA: MERASA LELAH BERLEBIHAN PADAHAL SUDAH TIDUR



TIDUR sangat penting untuk kesehatan seseorang, dan tidur bisa menghilangkan kelelahan seseorang.

Namun jika setelah tidur tidak menghilangkan rasa lelah Anda, bisa jadi itu adalah tanda hypersomnia.

Hypersomnia adalah kondisi kronis yang ditandai dengan episode kantuk berlebihan di siang hari atau tidur malam yang lama (lebih dari 11 jam), menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).

Gangguan ini bisa berakar pada gangguan neurologis, atau bisa juga akibat dari kebersihan tidur yang buruk dan faktor gaya hidup lainnya.

Tidak diketahui secara pasti berapa banyak orang yang mengalami kantuk berlebihan, tetapi Dr. Abhinav

Singh, direktur medis dari Indiana Sleep Center, mengatakan kepada Live Science bahwa hypersomnia tampaknya merupakan kondisi yang relatif umum, mempengaruhi antara 10 persen hingga 20 persen orang dewasa di seluruh dunia.

Anita Raja mengatakan gejala hypersomnia tidak boleh diabaikan. "Mereka dapat memiliki efek buruk pada suasana hati, konsentrasi, hubungan, dan tingkat energi kita," katanya dilansir dari Livescience.

Jika Anda merasa lelah di siang hari meski sudah tidur nyenyak, atau sering tidur siang tapi masih merasa lelah, cobalah konsultasikan ke dokter.

Gejala hypersomnia

Istilah hypersomnia sering digunakan secara bergantian dengan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari, atau hipersomnolen.

Individu dengan hypersomnia merasa sulit untuk bangun, dan mereka merasa perlu tidur siang berulang kali sepanjang hari.

Selain itu, tidur cenderung tidak menghilangkan rasa lelah dan kantuk.

"Orang dengan kondisi ini mungkin tidur selama 11 jam di malam hari, namun mereka tetap merasa lelah di siang hari," kata Raja.

Hypersomnia bukanlah kondisi yang mengancam jiwa, menurut NINDS, tetapi dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk kecelakaan akibat tertidur saat mengemudi.

Hypersomnia dapat menjadi gejala dari banyak kondisi medis yang

berbeda, dan praktisi kesehatan sering mengklasifikasikan gangguan tersebut sebagai primer atau sekunder, tergantung pada penyebab yang mendasarinya.

Menurut Sleep Foundation, sebuah organisasi nirlaba di AS, hypersomnia diklasifikasikan sebagai hypersomnia primer jika terjadi dengan sendirinya dan tidak disebabkan oleh kondisi atau faktor lain yang diketahui. Hypersomnia sekunder adalah ketika kelainan tersebut disebabkan oleh kondisi medis lain, obat-obatan, zat, gangguan kejiwaan, atau kurang tidur.

Hypersomnia seringkali merupakan gejala sekunder atau gejala dari kondisi medis lain. Kantuk yang berlebihan terutama dapat berkembang sebagai akibat dari hipotiroidisme, cedera otak, dan penyakit pada sistem saraf, seperti penyakit Parkinson, epilepsi, dan multiple sclerosis.

Kantuk yang berlebihan juga dapat menjadi efek dari obat penenang tertentu, penggunaan alkohol yang berlebihan atau penarikan dari obat perangsang, menurut Sleep Foundation.

Perawatan untuk hypersomnia tergantung pada penyebab gangguan tersebut, menurut NINDS.

Misalnya, hypersomnia idiopatik dapat diobati dengan obat yang disebut Xywav - satu-satunya pengobatan yang disetujui Food and Drug Administration, yang dianggap bekerja selama tidur untuk membantu mengatasi gejala di siang hari atau stimulan seperti amfetamin, metilfenidat, dan modafinil.

Perawatan juga dapat melibatkan opsi non-obat. "Untuk hypersomnia primer, tidur siang singkat bersama dengan kafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan," kata Singh.

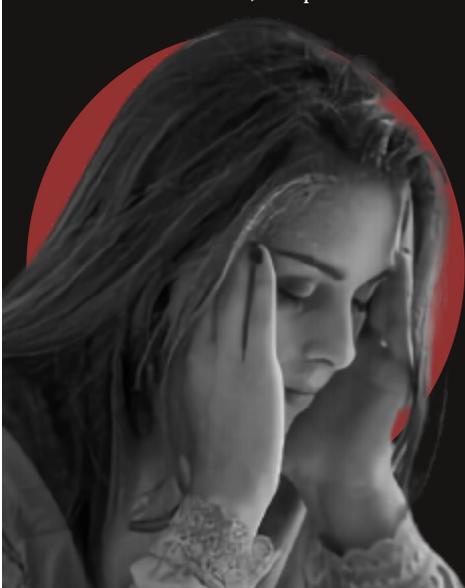
Pasien dengan hypersomnia sering disarankan untuk mengubah gaya hidup mereka dengan cara yang meminimalkan gangguan pada siklus tidur mereka. Mereka mungkin diminta untuk menghindari kerja malam atau mengurangi asupan alkohol.

Menjaga berat badan yang sehat, makan makanan yang sehat dan seimbang, bermeditasi dan berlatih yoga adalah cara lain untuk mengatasi rasa kantuk yang berlebihan di siang hari, kata Raja (Bisnis)



MENURUT NINDS, GEJALA HIPERSOMNIA :

- Kecemasan
- Sifat lekas marah
- Tingkat energi rendah
- Kegelisahan
- Bicara lambat
- Kehilangan selera makan
- Halusinasi
- Masalah memori



WhatsApp Hadirkan Aplikasi macOS Versi Beta

WHATSAPP menghadirkan aplikasinya secara khusus di macOS versi beta untuk publik dan sudah dapat diunduh di situs web resmi WhatsApp.

Hadirnya aplikasi itu akan menjadi langkah pertama WhatsApp membawa aplikasi khusus ke laptop besutan Apple.

Melansir WA Beta Info, sebelumnya tidak ada aplikasi khusus WhatsApp di laptop dan perangkat dengan sistem operasi macOS.

Pengguna yang memakai laptop atau PC dengan sistem operasi macOS sebelumnya hanya bisa mengakses layanan pesan instan tersebut melalui situs website web.whatsapp.com.

Agar dapat mencoba versi WhatsApp untuk MacOS versi beta tersebut anda perlu memenuhi persyaratan minimum yakni menggunakan macOS 11 Big Sur.

Tentunya pengguna yang menggunakan macOS terbaru juga sudah bisa menjajal aplikasi WhatsApp beta ini.

Pengembangan aplikasi ini nampaknya sudah dilakukan sejak setengah tahun yang lalu.

Jika anda penasaran bagaimana menjajal aplikasi WhatsApp secara khusus di macOS maka anda bisa mengunduhnya langsung dan menjajalnya.

Setelah menginstal aplikasi, Anda dapat menautkan akun dari perangkat Android atau iOS Anda ke WhatsApp untuk macOS dengan memindai QR Code.

Beberapa pengguna yang telah menjajal versi beta ini menyebutkan aplikasi tersebut telah dioptimalkan dan memberikan pengalaman pengguna lebih cepat dan efisien dalam bertukar pesan.

Selain itu, aplikasi tersebut dirancang sehingga terasa lebih seperti aplikasi Mac dengan memperkenalkan sidebar di

aplikasinya, dan kemampuan untuk menarik dan melepas file.

Perlu diingat karena masih dalam versi beta, beberapa fitur mungkin masih belum berfungsi dengan baik.

Mungkin akan ada juga fitur lebih banyak hadir di versi stabil dari aplikasi WhatsApp untuk macOS itu.

Sebelumnya, pada awal Januari 2023 lalu WhatsApp dikabarkan sedang menyiapkan fitur mengunggah pesan suara sebagai status di aplikasi pesan instan itu.

Laman WABetaInfo, menemukan fitur status pesan suara sedang diuji coba melalui aplikasi WhatsApp Android versi beta 2.23.2.8. Pada aplikasi versi beta itu, sejumlah pengguna bisa mengunggah status pesan suara.

Untuk mengakses fitur itu, pengguna bisa mengunjungi tab status pada WhatsApp versi beta dan mengklik ikon teks untuk mengunggah status. Jika sudah tersedia, pengguna bisa melihat ikon perekam suara pada bagian bawah laman untuk membuat status.

WhatsApp memberikan durasi maksimal 30 detik untuk pesan suara. Platform juga memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk membuang rekaman suara dan mengulang perekaman lagi sebelum membagikan status pesan suara.

Untuk mendengar status pesan suara yang diunggah teman mereka, pengguna juga harus menggunakan aplikasi WhatsApp beta versi terbaru.

Sama seperti status teks dan video, status pesan suara juga akan hilang dalam 24 jam. Pengguna juga bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat status pesan suara yang mereka buat (Ant)





KONSUMSI IKAN PENTING UNTUK TUMBUH KEMBANG ANAK

AHLI kesehatan yakni dokter Spesialis Gizi Klinik Nurhati Febriani, SpGK, FINEM, AIFO-K mengingatkan pentingnya konsumsi ikan untuk mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak sebagai salah satu upaya mencegah stunting.

"Konsumsi protein hewani, khususnya ikan sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak," katanya.

Dokter yang praktik di RSUD Hj Anna Lasmana Banjarmasin, Jawa Tengah, itu menambahkan bahwa kandungan protein yang terdapat di dalam ikan sangatlah tinggi.

"Ikan juga mudah dicerna oleh anak dan mengandung asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino tubuh manusia," katanya.

Dia menambahkan bahwa asam amino taurin yang terkandung di dalam ikan dapat berperan besar dalam perkembangan otak dan merangsang pertumbuhan sel otak di masa balita dan pada 1.000 hari pertama kehidupan atau masa emas pertumbuhan anak.

"Karena itu, para orang tua dapat memperbanyak konsumsi protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka, khususnya ikan atau protein hewani lainnya," katanya.

Ia menyebutkan, protein hewani

lain yang juga penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di antaranya telur, daging, dan lain sebagainya.

"Selain memperbanyak jumlah protein hewani, jangan lupa tetap masukkan lemak dalam porsi makan anak sesuai kebutuhan harian," katanya.

Menurut dia orang tua tetap perlu memerhatikan kandungan makronutrien, seperti karbohidrat, protein dan lemak, juga mikronutrien, seperti vitamin dan mineral serta air pada porsi makan anak.

"Pemenuhan pola makan bergizi seimbang akan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama dalam mendukung upaya pencegahan stunting," katanya.

Sementara itu, ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dr Yudhi Wibowo mengatakan Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap 25 Januari menjadi momentum tepat memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.

"Hari Gizi Nasional momentum yang tepat untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat melalui asupan bergizi seimbang," katanya.

Pengajar di Fakultas Kedokteran

Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah tersebut, menambahkan saat ini terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak, mulai dari pemangku kepentingan hingga masyarakat.

"Tiga hal tersebut antara lain penyakit tidak menular, penyakit menular, dan masalah gizi, baik itu masalah gizi lebih maupun gizi kurang termasuk juga stunting," demikian Yudhi Wibowo.

Tepisah Lektor Kepala Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Dr. Niken Dharmayanti mengungkap sebuah survei terhadap 4 kelompok pengonsumsi ikan dengan frekuensi yang berbeda dan diamati selama 16 tahun. Kelompok pertama makan ikan tiap hari, kedua makan ikan kadang-kadang, ketiga jarang sekali makan ikan dan terakhir tidak makan ikan sama sekali.

"Hasil kelompok 1 pada umumnya memiliki angka kematian yang rendah dibandingkan kelompok 4 berkaitan berbagai macam kanker, jantung dan hepatitis," ucapnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti menyatakan, pihaknya mengajak para ibu untuk menjadi agen kesehatan keluarga dengan menyiapkan konsumsi ikan lokal di meja makan serta menjadikan ikan sebagai menu utama keluarga.

"Peningkatan konsumsi ikan diharapkan akan menggerakkan produksi di hulu serta terjadi perbaikan gizi masyarakat yang akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia," terang Artati (Ant)

Peningkatan konsumsi ikan diharapkan akan menggerakkan produksi di hulu serta terjadi perbaikan gizi masyarakat yang akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia,"

ARTATI WIDIARTI

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP



Awut-awutan Soal ... (dari hal 1)

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan duduk masalah soal anggaran kemiskinan. Anas menyebut sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas, Minggu (29/1/2023),

Anas juga mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

"Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatra, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Tiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan, setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak," ujarnya.

Anas menjelaskan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi soal jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu. Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Saat itu, Anas memaparkan logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.

"Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang inginnya

mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal," papar Anas.

Anas juga sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai. "Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai," terangnya.

Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding. "Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat," ujarnya.

Anas menambahkan, saat ini pemerintah terus mengakselerasi program reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi tujuh persen pada 2024.

Adapun per September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

"Target kemiskinan pada 2024 adalah tujuh persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai tujuh persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan," ujar Anas.

Sehingga Presiden Jokowi, sambung dia, menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras. "Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu

langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan," tuturnya.

Data menunjukkan, tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp535.547 dari sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022.

Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% (Maret 2022: 7,5%). Persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,29%).

Pada September 2022, BPS juga mencatat garis kemiskinan di Indonesia di angka Rp 535.547 per kapita per bulan. Sehingga pengeluaran masyarakat yang kurang dari Rp 17.851 per hari masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Artinya penduduk dengan penghasilan di bawah Rp 535.547 per kapita masuk kategori tidak mampu.

Komposisinya adalah garis kemiskinan makanan sebesar Rp 397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 138.442 (25,85 persen). Rata-rata, rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota keluarga. Dengan demikian, besaran garis kemiskinan per rumah tangga miskin rata-rata Rp 2.324.274.

Pemerintah Diminta Jujur

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang mengatakan, memang selama ini belanja sosial belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak dan bisa melakukan aktivitas produktif untuk menutupi

kebutuhan.

Marwan menilai dari puluhan juta masyarakat miskin yang setiap tahun mendapat bantuan sosial, pasti banyak di antara mereka yang mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup. "Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal yang betul-betul, yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni," katanya.

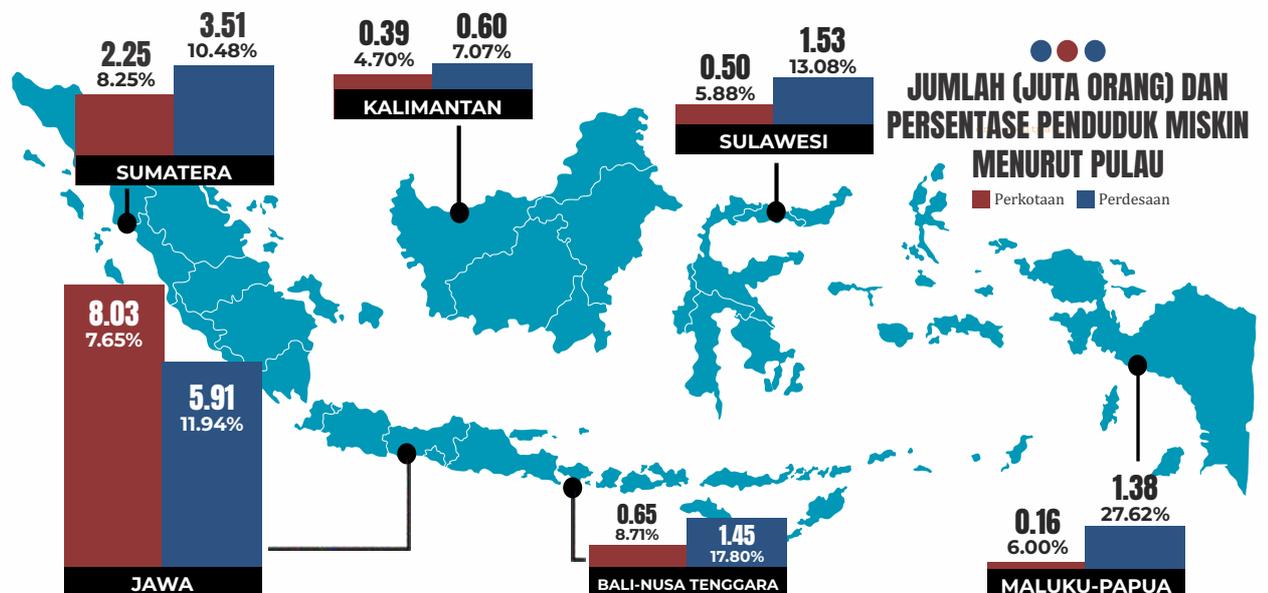
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengaku tak heran dengan pernyataan MenPANRB tersebut. Sebab, fenomena anggaran pemerintah triliun rupiah habis untuk rapat dan studi banding merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahun.

"Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah. Ia menjelaskan dalam struktur APBN maupun APBD, belanja negara dibagi menjadi tiga, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa atau belanja habis pakai, dan belanja modal.

Jika dipersentasekan, ia melanjutkan, belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsi lebih besar di tiap KL. Biasanya, belanja itu 'bersembunyi' di balik nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan.

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin. Namun, ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Sebaliknya, lanjut Misbah, anggaran yang betul-betul menasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim. "Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan gelondongan," tegasnya. (wid,rls,kum,kcm/dya)





SINERGI DPRD SURABAYA MENEKAN KEMISKINAN

SURABAYA - Awal tahun 2023, kalangan legislator DPRD Kota Surabaya menggelar reses atau penjarangan aspirasi masyarakat. Mereka turun ke basis-basis masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Mereka menyampaikan laporan kepada warga masyarakat tentang capaian kinerja sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Apa saja yang telah diperjuangkan dan berhasil diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan di Kota Surabaya. Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan, yang nanti akan diartikulasikan dalam kebijakan pemerintahan maupun menerima berbagai masukan untuk dirumuskan dalam peraturan daerah.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, melakukan penjarangan aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya timur. Ia menerima curhat dari kalangan RT, RW, LPMK, dan ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, jamaah pengajian, serta kaum muda dan karang taruna.

Salah satu isunya adalah mengenai kemiskinan, yang mula-mula di Surabaya disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan berubah menjadi warga miskin atau Gamis. "Perubahan itu diikuti berkurangnya jumlah warga MBR ke Gamis. Apa sebenarnya ukuran warga disebut tidak mampu atau miskin?" kata Ibu Mariana dari Kali Rungkut, Sabtu (29/1/2023).

Di kawasan perkampungan

Gununganyar Tambak, Adi Sutarwijono dari Fraksi PDI Perjuangan juga mendapat curhat yang sama. Karena ketidakpastian indikator keluarga miskin. "Kalau ukurannya warga miskin yakni rumah terbuat dari dinding kayu atau bambu, lantai tanah, dan penghasilan di bawah Rp 1 juta, ya sangat sedikit sekali," ujar Fausi.

"Kami sering ditanyai warga dan menerima keluhan soal itu," kata dia. Di Kota Surabaya, warga miskin mendapatkan berbagai intervensi kebijakan pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan permakanan satu kali sehari untuk warga lansia tidak mampu, warga disabilitas dan anak yatim piatu.

"Data MBR banyak dicoret," kata Saiful dari Tenggilis Mejoyo. Juga kuota warga yang mendapat permakanan, sekarang jauh berkurang. "Banyak warga lansia, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, yang dulu menerima bantuan permakanan, sekarang tidak lagi karena datanya hilang atau dicoret," kata Ibu Mega dari Kalijudan.

Juga mencuat curhat warga terkait pemasangan stiker 'Keluarga Miskin' yang ramai diberitakan media massa, dan mengundang polemik dari legislator. "Apa

tidak bisa dicarikan istilah lain? Kasihan keluarga yang ditempel stiker itu," kata Siti Aisyah dan Klampis Ngasem.

Adi Sutarwijono menampung semua keluhan itu. Dijelaskan, DPRD Surabaya tengah membahas Raperda pengentasan kemiskinan. Pembahasan



Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono saat melakukan penjarangan aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya timur.

dilakukan sinergis dengan Pemkot Surabaya. "Semua masukan masyarakat menjadi bahan pembahasan di DPRD. Kalau sudah menjadi Perda atau Peraturan Daerah, itu akan memberikan kepastian hukum bagi semuanya," ujarnya.

Ia juga menjelaskan sikap dirinya yang sepakat dicari istilah lain dari keluarga miskin dalam penempelan stiker. "Misalkan, diganti keluarga pra sejahtera. Atau stiker hanya barcode. Ketika dilihat di HP keluar identitasnya," ujar Adi.

Melalui berbagai program pemerintahan, DPRD Kota Surabaya dan Walikota Eri Cahyadi bersama Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di Kota Pahlawan. Terutama dengan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, dan penyerapan tenaga kerja produktif. "Kita berkomitmen untuk terus menekan kemiskinan di masyarakat," katanya.

Ia juga menjelaskan sejumlah kemajuan pemerintahan Kota Surabaya, yang dipimpin Walikota Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Armuji, dengan dukungan DPRD Kota Surabaya. Seperti mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan instrumen berbasis elektronik. "Pelayanan adminduk harus tuntas di kelurahan," katanya. Juga layanan

jemput bola petugas kelurahan ke balai-balai RW, satu minggu dua kali.

Adi juga memaparkan program Pemkot Surabaya, setelah disetujui DPRD, tentang perbaikan 8 ribu jamban bagi penduduk dan perbaikan 3.500 rumah tidak layak huni. "Juga tahun 2023 diluncurkan beasiswa bagi 25 ribu pelajar SMA/SMK sederajat, negeri dan swasta, dari keluarga tidak mampu," katanya.

Ia mengapresiasi kebijakan Walikota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya yang mendirikan rumah-rumah padat karya untuk menekan angka pengangguran dan mengungkit penguatan ekonomi keluarga-keluarga yang tidak mampu. "Juga dilakukan perluasan layanan air bersih oleh PDAM. Semua kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat di semua sektor," katanya.

Adi juga menerima penjelasan tentang kinerja massif ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam menekan prevalensi balita stunting. Ibu Charles dari Tenggilis Mejoyo, menjelaskan di kawasannya angka stunting yang semula lima balita, kini menjadi satu anak. "Ibu-ibu KSH benar-benar hebat! Telah bekerja keras menekan angka stunting, memperhatikan kesehatan masyarakat dan warga lanjut usia, pendidikan dan sebagainya," kata Adi. (Adv/Mira,dya)

